

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

Siti Basariyah

sbasariyah@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako Palu

Abstract

This research is conducted in The Agency of Community Empowerment and Village Government of Central Sulawesi Province and aims to analyze the effectiveness and efficiency of budget execution and to identify constraints in budget execution in The Agency of community Empowerment and Village Government of Central Sulawesi Province with descriptive data analysis. Informants in this research are officials in The Agency of Community Empowerment and Village Government of Central Sulawesi Province. The results identify that the effectiveness ratio of programs from 2011 to 2015 in average had been high, means that programs effectively implemented. Yet, there were some programs in the year of 2013 and 2015 categorized “quite effective” because some budgeted programs did not run very well. Efficiency ratio during that period of time shows that budget execution is quite efficient, especially in 2015. This means that programs are well executed despite some budget cuts; the minimum budgeting can produce good program performance.

Keyword: *Effectiveness, Efficiency, and Budget*

Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan menurut Halim (2007).

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya.

Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*),

serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyusun dan menetapkan Renstra BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah dengan berpedoman pada RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Renstra BPMPD yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPMPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Adapun rencana strategis dan penetapan kinerja di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41. Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No.32 Tahun 2009 tentang

uraian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi antara lain: Sekretariat memiliki tugas untuk pelayanan administrasi meliputi perencanaan program, keuangan dan asset serta kepegawaian dan umum dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan memiliki tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan dan aset, pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan; Bidang Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas dan fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dibidang pembinaan dan pengembangan Sosial Budaya Masyarakat; Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas dan fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) mempunyai Tupoksi melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat dibidang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Mewujudkan keberadaan dan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan program dan

kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, dan bersih sebagai aparatur pemerintah. Namun demikian, selain beberapa keberhasilan yang dicapai, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga mencatat adanya beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat diwujudkan sepenuhnya. Misalnya pada tahun 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 10 program dan 30 kegiatan dengan Realisasi Fisik sebesar 98.09%. Hal tersebut menggambarkan masih adanya sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan.

Permasalahan rendahnya daya serap anggaran setiap tahun juga menjadi masalah rutin setiap tahunnya. Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2011 disebutkan bahwa daya serap anggaran belanja kementerian dan lembaga dalam lima tahun terakhir rata-rata hanya 90% dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN setiap tahun. Penyerapan dana tidak efektif tercermin dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang menurut oleh Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP <http://www.bpkp.go.id>.

Berdasarkan uraian di atas, hasil evaluasi tersebut di tinjau kembali oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah bahwa Pemberdayaan Masyarakat umumnya dapat dilaksanakan dan mencapai capaian yang sangat baik oleh pemerintah akan tetapi masih ada beberapa hambatan dan permasalahan yang sering dihadapi dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain perubahan konsep atau paradigma pembangunan masyarakat dari pembangunan masyarakat menjadi pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku pemberdayaan, kurang adanya kesinambungan suatu kegiatan/program terutama untuk program pemberdayaan yang membutuhkan skema keberlanjutan sampai periode tertentu, belum optimalnya peran aktif

kelompok masyarakat tertentu dalam pembangunan, serta terbatasnya kualitas SDM dan kurangnya akses/informasi bagi masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) “penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual”.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang dapat diwawancarai untuk memperkuat penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini. Informan kunci atau yang di wawancarai dalam penelitian ini sebanyak 11 (sebelas) orang, berikut daftar informan kunci yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sekretariat 1 Orang.
2. Bidang Sosial Budaya Masyarakat 2orang
3. Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat 2 Orang.
4. Bidang Sumber Daya Alam dan TTG 2 orang.
5. Bidang Pemerintahan Desa Kelurahan dan Masyarakat 2 Orang.
6. DPPKAD Propinsi Sulawesi Tengah 1 Orang.
7. Masyarakat Penerima Bantuan 1 Orang.

Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan metode yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis, data diberi arti dan makna

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Metode analisis data yang dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif atau menggunakan rumus pada umumnya. Berikut analisis data yang digunakan:

1. Analisis Efektivitas

Pengertian Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian target . Analisis yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tingkat efektivitas diukur dengan membandingkan antara Realisasi Anggaran Belanja Langsung Terhadap Target Belanja Langsung.. Adapun rumus dari efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja Langsung}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun, 2009

Adapun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

2. Analisis Efisiensi

Mardiasmo (2009:132) efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan

terhadap input yang digunakan (*cost of output*).

Rasio efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan, dalam satuan persen (Mahsun dalam Utama, 2008). Rumus efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur pelaksanaan anggaran pada BPMPD Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun, 2006

Adapun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Propinsi Sulawesi Tengah

1. Tingkat Efektivitas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian sekretariat BPMPD, proses pelaksanaan kegiatan ini tak lain untuk

menunjang pelaksanaan kegiatan dan menyelesaikan beberapa tugas tahunan sebagai proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Program ini memiliki uraian kegiatan menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkup BPMPD, berikut uraian Efektivitas dari pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran yaitu:

Tabel 1. Efektivitas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Ket
2011	454.998.725	422.600.122	92,88%	Efektif
2012	468.564.316	457.407.172	97,62%	Efektif
2013	436.929.261	410.533.966	93,96%	Efektif
2014	416.216.597	409.480.248	98,38%	Efektif
2015	261.596.050	239.077.091	91,39%	Efektif

Sumber: Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran BPMPD Daerah Prov.Sulteng Tahun 2011 s.d 2015

Berdasarkan uraian tabel di atas menunjukkan kegiatan BPMPD Daerah Prov.Sulteng melalui program pelayanan administrasi perkantoran selama 5 (lima) tahun hasilnya berfluktuasi namun rata-rata pelaksanaan anggarannya sudah masuk pada kriteria efektif. Dimana perbandingan antara target dan realisasi semakin mendekati 100%. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan saja yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu memenuhi kebutuhan administrasi kantor agar dapat mencapai peningkatan kinerja aparat BPMPD Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memenuhi tugas dan fungsi pelayanan administrasi pemerintahan yang maksimal serta Sub kegiatan yang kedua adalah menugaskan aparat BPMPD Propinsi untuk mengikuti diklat, bimtek, pelatihan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Kegiatan ini realisasi anggarannya setiap tahun meningkat serta rutin dilaksanakan. Tujuan dan manfaat dari kegiatan ini agar tersedianya aparat teknis dalam membantu kelancaran pelayanan

administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. Tingkat Efektivitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan melaksanakan kegiatan berupa pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdapat pada BPMPD Propinsi Sulawesi Tengah. Hasil perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan melalui program peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan mencapai hasil rasio yang efektif, yang artinya perencanaan yang dilakukan sesuai dengan pelaksanaan. Suksesnya kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya peran SKPD semata tetapi peran masyarakat juga dukungan dari beberapa pihak. Uraian tabel tingkat Efektivitas program peningkatan sarana dan prasarana aparatur selama 5 (lima) tahun yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Efektivitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Ket
2011	457.036.200	455.907.400	99,75%	Efektif
2012	492.842.014	468.682.918	95,10%	Efektif
2013	686.209.357	683.312.534	99,58%	Efektif
2014	575.807.139	573.742.392	99,64%	Efektif
2015	593.018.238	566.507.680	95,53%	Efektif

Sumber: Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran BPMPD Daerah Prov.Sulteng Tahun 2011 s.d 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun pelaksanaan kegiatan rata-rata masuk pada kriteria efektif. Kegiatan ini dilaksanakan oleh bagian sekretariat. Dalam program tersebut kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan selama lima tahun telah sesuai dengan rencana, pertama kegiatan tersebut menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkup BPMD Daerah Prov.Sulteng, kegiatan ini berupa pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dikantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sehingga

manfaat yang di dapatkan dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPMPD Daerah Prov. Sulteng dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dapat meningkat.

Kegiatan yang kedua adalah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor serta perlengkapannya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas kegiatan di lingkup BPMPD Daerah Prov.Sulteng. Kegiatan ini berupa pemeliharaan kendaraan operasional, komputer, perlengkapan gedung kantor, sarana gedung kantor dan peralatan kerja lainnya. Manfaat dilaksanakannya kegiatan ini agar tercapainya kelancaran pelayanan tugas-tugas operasional kedinasan, adanya kegiatan ini memperpanjang umur ekonomis kendaraan operasional, serta fasilitas kantor lainnya.

3. Tingkat Efektivitas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melaksanakan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Program ini hanya melaksanakan satu kegiatan saja dan dilaksanakan rutin selama lima tahun, pada bagian sekretariat. Berikut uraian tingkat Efektivitas yang dicapai pada pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yaitu:

Tabel 3. Efektivitas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Ket
2011	201.026.100	199.826.100	99,40%	Efektif
2012	162.275.670	154.670.270	95,31%	Efektif
2013	62.822.000	60.680.700	96,59%	Efektif
2014	63.360.000	62.404.400	98,40%	Efektif
2015	91.193.800	79.623.400	87,31%	Cukup efektif

Sumber: Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran BPMPD Daerah Prov.Sulteng Tahun 2011 s.d 2015

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa selama 4 (empat) tahun anggaran, hasil yang dicapai masuk dalam kategori efektif. Ini menandakan realisasi anggaran pelaksanaan sudah mencapai target yang diharapkan walaupun penyerapan anggarannya belum sampai mencapai 100%. Ini disebabkan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Seperti adanya kelebihan pada belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

Tercapainya hasil yang efektif menggambarkan bahwa bagian sekretariat berhasil menjalankan tugas dengan semestinya khususnya menciptakan laporan kinerja keuangan atau pemutakhiran data. Pada program ini dilaksanakan dua sub kegiatan yaitu menyusun dan membuat SK Tim penyusun laporan semesteran, Tim penyusun RKA/DPA dan Tim penyusunan Lakip dan laporan akhir tahun. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah laporan baik dari perencanaan maupun pertanggung jawaban keuangan dengan melibatkan beberapa sumber daya manusia. Sub kegiatan yang kedua adalah menyiapkan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dalam rangka lokakarya/pemutakhiran data dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jendral di Jakarta dan daerah lainnya.

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil tersebut adalah tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen sistem pelaporan capaian kinerja keuangan serta terlaksananya lokakarya/pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan meningkatnya kinerja BPMPD Daerah Prov.Sulteng sebagai bahan rekomendasi bagi penataan perencanaan program dan kegiatan. Namun Pada tahun 2015 hasil perhitungan menunjukkan masih dalam kategori cukup efektif Ini disebabkan realisasi anggaran yang dicapai masih cukup jauh perbedaannya untuk memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Pengalokasian anggaran pada tahun tersebut hanya untuk belanja barang dan jasa saja yaitu belanja

cetak dan penggandaan serta belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tidak dapat diserap seluruhnya.

4. Tingkat Efektivitas Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan melaksanakan kegiatan melalui pembinaan, pelatihan dan pemberian bantuan untuk masyarakat desa. Pada program ini ada 2 (dua) bidang yang terlibat untuk melaksanakan program tersebut untuk mencapai kinerja yang baik, bidang tersebut adalah bidang sosial budaya masyarakat serta bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Berikut uraian tingkat Efektivitas untuk program keberdayaan masyarakat pedesaan yaitu:

Tabel 4. Efektivitas Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Ket
2011	1.677.983.650	1.623.776.578	96,77%	Efektif
2012	1.561.314.650	1.496.609.806	95,86%	Efektif
2013	2.251.799.250	2.105.699.971	93,51%	Efektif
2014	2.650.152.100	2.493.626.245	94,09%	Efektif
2015	1.798.694.200	1.641.512.879	91,26%	Efektif

Sumber: Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran BPMPD Daerah Prov.Sulteng Tahun 2011 s.d 2015

Tabel di atas menunjukkan perhitungan rasio pelaksanaan program keberdayaan masyarakat pedesaan mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun tetapi masih masuk kategori efektif karena pencapaiannya diatas 90% yang artinya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana. Selama 5 (lima) tahun program dan kegiatan yang ditetapkan mengalami perubahan nomenklatur.

5. Tingkat Efektivitas Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Program pengembangan lembaga ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan melalui pembinaan, pemberdayaan dan akselerasi pemberdayaan lembaga keuangan

mikro. Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang ekonomi pemberdayaan masyarakat. Berikut uraian tingkat Efektivitas program pengembangan lembaga ekonomi selama lima tahun yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Efektivitas Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Ket
2011	901.352.000	880.776.000	97,72%	Efektif
2012	1.023.732.000	938.535.185	91,68%	Efektif
2013	808.625.318	699.431.668	86,50%	Cukup Efektif
2014	920.982.565	878.293.799	95,36%	Efektif
2015	359.478.700	329.147.651	91,56%	Efektif

Sumber: Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran BPMPD Daerah Prov.Sulteng Tahun 2011 s.d 2015

Tabel di atas menunjukkan hasil dari pelaksanaan program. Rata-rata perhitungan sudah masuk pada kategori efektif terkecuali tahun 2013 pelaksanaan kegiatan hanya terealisasi sebesar 86% saja dikarenakan ada selisih anggaran yang dikembalikan dan tidak di SPP kan antara lain selisih perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta selisih belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana kegiatan membawa dampak positif dan manfaat yang diperoleh masyarakat berupa:

1. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan serta keterampilan pengelola pasar desa, bumdes, lumbung pangan masyarakat desa (CPPD), lembaga LSP-BM dan lembaga simpan pinjam perempuan.
2. Terlaksananya administrasi pengelolaan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.
3. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan serta keterampilan masyarakat marginal perkotaan serta meningkatnya penghasilan/pendapatan lembaga usaha ekonomi masyarakat marginal perkotaan.

Meningkatnya pendapatan dan penghasilan masyarakat miskin perdesaan/

perkotaan sehingga taraf hidup dan kesejahteraan mereka juga meningkat.

6. Tingkat Efektivitas Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa merupakan kegiatan yang dilakukan agar masyarakat lebih proaktif dan kritis menyikapi kegiatan-kegiatan pembangunan di desanya, karena peranan masyarakat mempengaruhi berhasil tidaknya target pembangunan pada suatu daerah. Uraian tingkat efektivitas pada program ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Efektivitas Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Ket
2011	827.279.000	818.971.250	99%	Efektif
2012	1.398.568.250	1.364.217.500	97,54%	Efektif
2013	1.683.393.637	1.520.875.137	90,35%	Efektif
2014	1.695.923.137	1.684.495.434	99,33%	Efektif
2015	1.626.300.111	1.598.548.000	98,29%	Efektif

Sumber: Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran BPMPD Daerah Prov.Sulteng Tahun 2011 s.d 2015

Tabel di atas menunjukkan hasil pelaksanaan untuk semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target, walaupun perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya berfluktuasi selama lima tahun. Data tiga tahun pertama mengalami penurunan signifikan, nilai terendah terdapat pada tahun 2013 dimana terdapat selisih anggaran sebesar Rp.162.518.500,- yang tidak di SPP kan dan merupakan Silpa anggaran kegiatan belanja barang dan jasa. Berdasarkan uraian tabel menunjukkan rata-rata pencapaian kinerja yang dilakukan pada program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa terealisasi dengan baik.

Melalui program ini manfaat yang dicapai adalah meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan sebagai upaya memberikan apresiasi dan motivasi guna mendorong terus

tumbuh dan berkembangnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam segenap kegiatan pembangunan serta meningkatkan dan memantapkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan.

7. Tingkat Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dimana program ini dilaksanakan oleh bidang pemerintah desa, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan bagi aparat desa dengan harapan mereka mampu mengimplementasikan berbagai regulasi baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri dalam negeri dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka di desa. Berikut uraian tingkat Efektivitas program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa selama lima tahun yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Ket
2011	1.291.928.225	1.269.605.025	98,27%	Efektif
2012	2.520.000.000	2.486.794.600	98,68%	Efektif
2013	3.080.000.000	3.067.887.995	99,61%	Efektif
2014	6.470.332.370	6.456.992.149	99,79%	Efektif
2015	2.307.085.475	2.291.436.090	99,32%	Efektif

Sumber: Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran BPMPD Daerah Prov.Sulteng Tahun 2011 s.d 2015

Tabel di atas menunjukkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target perencanaan, hal ini dapat dilihat bahwa persentase perolehan pelaksanaan bekerja mencapai hampir 100% atau jika di lihat aktivitas yang dilakukan menghasilkan rasio yang efektif. Program ini dilaksanakan dengan 3 kegiatan seperti pemberdayaan dan pengembangan kapasitas aparat desa dalam rangka penguatan otonomi desa, pembinaan pengisian administrasi desa/

kelurahan Se-Provinsi Sulteng, serta rapat koordinasi pemerintahan desa Se-Provinsi Sulteng.

Pendapat Dwipayana (2003), bahwa peta Governance di desa terdiri dari:

1. Kepala desa dan perangkat desa mewakili negara;
2. Badan permusyawaratan desa mewakili masyarakat politik;
3. Institusi sosial, organisasi sosial, dan warga masyarakat;
4. Pelaku dan organisasi ekonomi mewakili masyarakat ekonomi.

Oleh karena itu, hubungan yang ideal dalam kehidupan ditingkat desa adalah keempat lembaga tersebut dilibatkan dalam proses pembangunan desa, sehingga perlu dibangun adanya partisipasi yang menyeluruh dan saling menguatkan antar lembaga-lembaga yang ada di desa.

8. Tingkat Efektivitas Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Kuantitas Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian, Pelaporan, dan Evaluasi Pembangunan

Program peningkatan kualitas hidup dan kuantitas perencanaan, pemantauan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi pembangunan merupakan kegiatan yang dilaksanakan BPMPD daerah Prov.Sulteng dalam melakukan koordinasi/konsultasi teknis program kerja PMD dan pembinaan terhadap BPMPD kabupaten/kota. Berikut uraian Efektivitas selama lima tahun pada program ini:

Tabel 8. Efektivitas Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Kuantitas Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian, Pelaporan, dan Evaluasi Pembangunan Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Ket
2011	438.161.100	430.449.700	98,24%	Efektif
2012	620.623.700	579.620.500	93,39%	Efektif
2013	505.783.000	426.269.350	84,28%	Cukup Efektif
2014	350.445.800	350.002.669	99,87%	Efektif

| 2015 | 710.278.100 | 683.981.200 | 96,30% | Efektif |
 Sumber: Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran
 BPMPD Daerah Prov.Sulteng Tahun 2011 s.d
 2015

Berdasarkan hasil tabel diatas selama periode anggaran tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tingkat efektifitas anggaran belanja rata-rata telah terlaksana sesuai target, kecuali tahun 2013 dimana pelaksanaan kegiatan hanya mencapai 84% atau masuk kategori cukup efektif artinya target yang hendak dicapai masih jauh dibandingkan dengan realisasi pelaksanaannya. Ini dikarenakan adanya selisih antara target dan realisasinya sebesar Rp.79.513.650.

Kegiatan program ini melalui rapat koordinasi, konsultasi, dan rapat kerja program perencanaan BPMPD serta untuk monitoring dan evaluasi. Adapun manfaat yang diperoleh dengan terlaksananya kegiatan ini meningkatkan koordinasi program dan kegiatan BPMPD Propinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mensinergikan, menterpadukan program dan kegiatan antara Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kota serta menghasilkan rumusan kesepakatan perencanaan program dan kegiatan sebagai keberlanjutan untuk tahun berikutnya.

9. Tingkat Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam pedesaan dilaksanakan melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dan konsultasi program konservasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang sumber daya alam dan TTG. Berikut uraian Efektivitas kegiatan dari program tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 9. Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Ket
2011	229.900.000	225.289.000	97,99%	Efektif
2012	414.782.400	393.702.800	94,92%	Efektif
2013	968.000.000	950.714.231	98,21%	Efektif
2014	425.906.029	420.619.860	98,76%	Efektif
2015	113.919.700	113.919.700	100%	Efektif

Sumber: Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran BPMPD Daerah Prov.Sulteng Tahun 2011 s.d 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan selama lima tahun kegiatan yang dilaksanakan mencapai hasil yang efektif dimana target sesuai dengan realisasi yang terjadi bahkan persentase ada yang mencapai 100%, yang artinya bahwa kegiatan ini sukses dan merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Manfaat yang di dapatkan dari program ini meningkatnya pengetahuan dan wawasan serta keterampilan masyarakat di kawasan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan pedesaan serta terkelolanya sarana dan prasarana air bersih di pedesaan.

10. Tingkat Efektivitas Perkembangan Program Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Program percepatan pemberdayaan masyarakat miskin merupakan program yang dilakukan untuk mencapai sasaran terbangunnya berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan keluarga yang mendukung lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat. Untuk melihat apakah bantuan yang diberikan pemerintah efektif atau tidak kepada masyarakat. Berikut uraian tingkat Efektivitas selama lima tahun yaitu:

Tabel 10. Efektivitas Program Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Ket
2011	1.082.135.000	1.079.892.000	99,79%	Efektif
2012	5.106.198.400	4.832.180.000	94,63%	Efektif
2013	5.591.380.000	5.436.314.000	97,23%	Efektif
2014	11.184.099.300	11.082.952.586	99,10%	Efektif
2015	3.187.716.383	2.822.096.183	88,53%	Cukup Efektif

Sumber: Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran BPMPD Daerah Prov.Sulteng Tahun 2011 s.d 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil pencapaian program percepatan pemberdayaan masyarakat tahun 2011 sampai 2014 terlaksana dengan efektif, terkecuali tahun 2015 pencapaian persentase kinerja hanya 88,53%, hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga sangat mempengaruhi penyerapan anggaran pada tahun tersebut. Kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sepenuhnya antar lain belanja pegawai yang tidak dapat terealisasi sejumlah Rp.4.800.000,- sisa belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.20.595.200,- serta selisih anggaran kegiatan stimulant sebesar Rp.340.225.000,-.

Berdasarkan hasil uraian dari 10 program di atas menunjukkan rata-rata pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun berjalan sesuai dengan target hal ini bila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusita Untari 2015 dengan judul penelitian Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang, kedua penelitian ini rata-rata hasil perhitungannya menunjukkan Pencapaian tingkat efektifitas sudah dikategorikan efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada belanja langsungnya, masing – masing program atau kegiatan sudah dijalankan sesuai yang diharapkan dan terlihat dari selisih antaran target dengan realisasinya dalam belanja langsung tidak terlalu jauh.

Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung rasio efisiensi yaitu total belanja langsung sebagai output dibandingkan dengan total belanja daerah sebagai input. Berikut uraian peningkatan efisiensi pada Badan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selama 5 (lima) tahun yaitu sebagai berikut:

Tabel 11. Penjabaran Rasio Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah (BPMPD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Total Belanja Daerah	Total Belanja Langsung	Persentase %	Ket
2011	9.543.857.972	7.407.093.175	78%	Efisien
2012	15.558.519.008	13.172.420.751	85%	Cukup Efisien
2013	18.065.759.250	15.361.719.552	85%	Cukup Efisien
2014	27.324.716.427	24.412.609.782	89%	Cukup Efisien
2015	15.055.123.883	10.365.849.874	69%	Efisien

Sumber: Data Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran BPMPD Daerah Prov.Sulteng Tahun 2011 s.d 2015

Berdasarkan perhitungan menunjukkan selama 5 (lima) tahun tingkat efisiensi anggaran belanja BPMPD Daerah Prov.Sulteng berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 tingkat efisiensi sebesar 77,61 % masuk pada kategori efisien namun berturut-turut ditiga tahun berikutnya terjadi penurunan tingkat efisiensi yaitu di tahun 2012 menjadi 84,66%, tahun 2013 menjadi 85,03% dan di tahun 2014 menjadi 89,34% tetapi masih masuk pada kategori cukup efisien artinya BPMPD daerah Prov.Sulteng walaupun terjadi peningkatan jumlah realisasi anggaran dalam menggunakan dan mengelola anggaran belanja tidak ada yang melebihi anggaran belanja yang telah ditetapkan. Tahun 2015 mengalami kenaikan tingkat efisiensi

yaitu jumlah perhitungan rasionya turun menjadi 68,85% karena ditahun tersebut walaupun terjadi penurunan anggaranbelanja langsungnya yang cukup signifikan namun menunjukkan hasil yang maksimal sebab dengan anggaran yang terbatas BPMPD Daerah Prov.Sulteng masih mampu menjalankan 10 program yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya bahkan sesuai dengan rencana strategis.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Tingkat dan kriteria Efektivitas untuk Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2015 rata-rata secara keseluruhan terlaksana secara Efektif, artinya kegiatan yang diprogramkan sudah trealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan. Namun ada beberapa program pada tahun 2013 dan 2015 kategorinya cukup efektif karena realisasi anggaran belanja masih di bawah 90%.
2. Rasio Efisiensi yang dihasilkan selama lima tahun menunjukkan hasil yang bervariasi, rata-rata pengelolaan anggaran belanja menunjukkan kategori cukup efisien, bahkan tahun 2011 dan 2015 hasilnya efisien, ini menunjukkan bahwa BPMPD Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana strategis. Adanya pengurangan Anggaran tidak mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan kepada masyarakat.
3. Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan pelaksanaan program ada beberapa yang mendasar, antara lain dukungan anggaran yang terbatas sehingga tidak semua kegiatan yang tertuang dalam program dapat dilaksanakan; masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia diperdasaan, sehingga sasaran

pembangunan belum bisa optimal; Pemerintah daerah kabupaten dan kota kurang proaktif dalam menindaklanjuti program kegiatan provinsi sehingga lambatnya program tersebut terlaksana di masyarakat.

Rekomendasi

1. Untuk pemerintah daerah khususnya BPMPD Daerah Provinsi Sulawesi Tengah harusnya lebih mensinergikan program dan kegiatan dengan intansi pemerintah yang lain agar output dan manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan lebih terarah serta dapat mengurangi belanja daerah khususnya belanja langsung
2. Sebaiknya peran BPMPD Kabupaten/Kota lebih pro aktif dalam menindak lanjuti semua program yang dilaksanakan BPMPD Daerah Provinsi Sulawesi Tengah agar dampak ke masyarakat lebih maksimal.
3. Seharusnya ada dukungan dan komitmen serta kebijakan pimpinan daerah yang konsisten untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Peningkatan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Penelitian ini terbatas pada pengukuran tingkat efektivitas dengan melihat kinerja keuangan daerah melalui perhitungan dan analisis terhadap pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas belanja langsung saja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya dalam menilai pertanggung jawaban suatu instansi pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangan melalui perhitungan dan analisis baik dari sisi input, output, outcome, impact dan benefitnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya tujukan kepada Prof. Dr. H. Andi Mattulada Amir, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Vitayanti Fattah, S.E, M.Siselaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada saya.

DAFTAR RUJUKAN

- AA.GN Ari Dwipayana. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*, IRE. Press, Yogyakarta.
- Halim Abdul. 2008. *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. UUP STIM.
- Halim Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung.